

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2025**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dan pelaksanaan Tahun Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026. Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021–2026 dan pedoman umum penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Tahun 2026 bersifat sangat strategis karena merupakan rencana kerja pelaksanaan pembangunan tahun pertama visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RENJA Tahun 2026 ini, akan menentukan keberhasilan capaian kinerja dan kesinambungan serta kelanjutan pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026 dengan Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2026. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Memacu daya saing daerah” melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

Demikianlah Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 disusun, untuk dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Dinas Pendidikan Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Teluk Kuantan, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



H. HERIZON, S.Pd.SD, MM

Pembina TK I/IVb

NIP. 197312041998031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN IS	
STRATEGIS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.2.2 Isu Strategis	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	
3.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat daerah	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
4.2 Rencana program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

4.3 Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Kunci Dinas Pendidikan, Kepemudaan

dan Olahraga

BAB V PENUTUP

iv DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan pedoman perencanaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk satu tahun (tahun 2025) yang memuat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga secara rinci. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja pada dasarnya berguna agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah khususnya dalam urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sebagai perwujudan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Kuantan Singingi telah merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun 2021-2026. Kesuksesan pencapaian seluruh target daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah. Operasional RPJMD dijabarkan secara lebih detail kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi dan RENSTRA Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing Perangkat Daerah untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub didalam indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

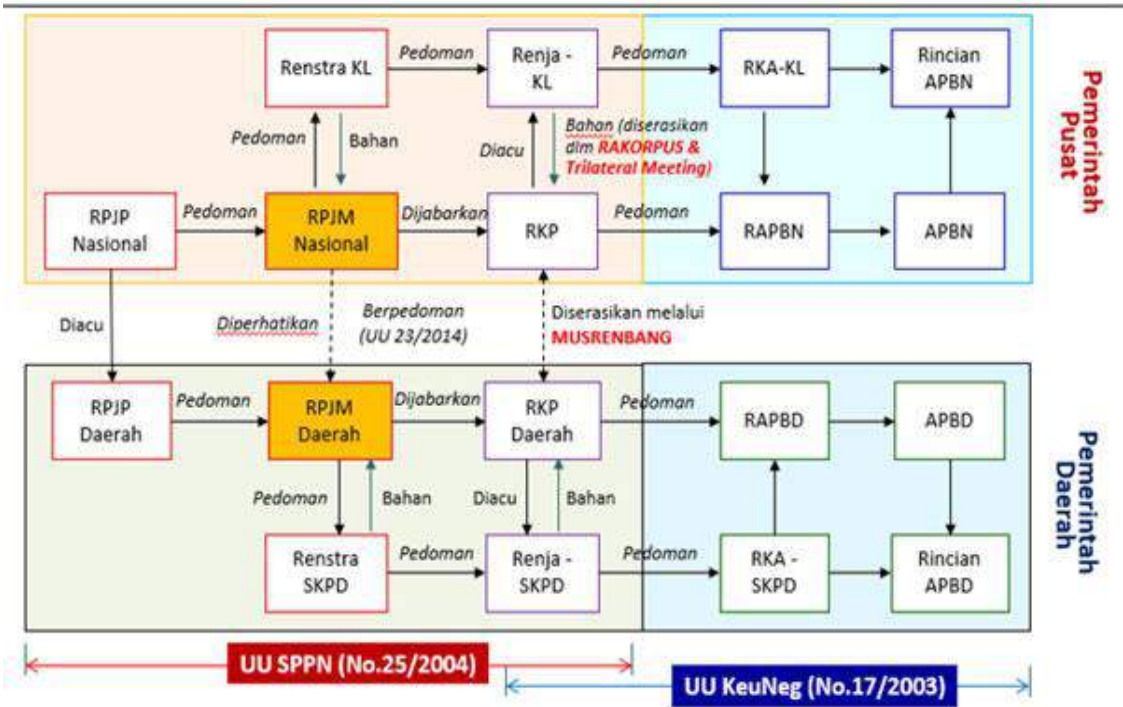
1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 yaitu : (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Peningkatan pelayanan publik dan (3) Memacu daya saing daerah
2. Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan.
3. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan sub kegiatan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
4. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana program, dan penganggaran tahunan.
5. Renja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

- 1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
- 2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1
Sistem Perencanaan Pembangunan



Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah

pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terAwal dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1).
20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu instrumen yang menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing,

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Daerah

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.

2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Renja Tahun Anggaran 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024. Berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut:

Tabel. TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kuantan Singingi

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	01	001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	01	001	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD	40	Dok		8	8	100	8	16	40
1	01	001	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dok		5	5	100	5	10	40
1	01	001	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Dok		2	2	100	2	4	40
1	01	001	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dok		1	1	100	1	2	40

1	01	001	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan gaji dan tunjangan ASN	100	%		100	100	100	100	100	100
1	01	001	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17589	orang/bulan		2884	2580	89	2904	5.484	31
1	01	001	2	02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok		1	1	91	1	2	38
1	01	001	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat	100	%		100	100	100	100	100	100
1	01	001	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	orang		12	12	100	20	32	32
1	01	001	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100	%		100	100	100	100	100	100
1	01	001	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	jenis		10	7	74	10	17	35
1	01	001	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	140	jenis		28	23	83	28	51	37
1	01	001	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	jenis		3	3	100	3	6	40
1	01	001	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	dok		1	0	27	1	1	25
1	01	001	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1945	laporan laporan		389	323	83	389	712	37
1	01	001	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan	100	%		100	100	100	100	100	100

1	01	001	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	unit		8	7	93	8	15	39
1	01	001	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100	100	100	100	100	100
1	01	001	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68750	buah		6530	6194,71	95	1.239	7.434	11
1	01	001	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	78	rekening		16	9,33	58	16	25	32
1	01	001	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	270	orang		54	37,91	70	54	92	34
1	01	001	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	%		100	100,00	100	100	100	100
1	01	001	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	unit		2	1,70	85	2	4	37
1	01	001	2	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	225 46740	unit M2		45 9348	44,9908 9348	99,980	45 9348	90	40
1	01	002				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/MI/PAKET A APK SMP/MTs/PAKET B Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B Persentase bangunan SMP/MTs dalam kondisi baik Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah siswa pendidikan sekolah dasar yang mendapat bantuan peralatan pendidikan Angka Melek Huruf Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)		%							0

1	01	002	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola									
1	01	002	2	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25	ruang		3	2,50	83	5	7	30
1	01	002	2	01	03	Pembangunan Ruangan Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah/ TU yang dibangun	19	ruang		1	0,09	9	3	3	16
1	01	002	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	96	ruang		1	0,20	20	16	16	17
1	01	002	2	01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	5	unit		1	0,09	9	1	1	22
1	01	002	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160	unit		11	8,49	77	28	36	23
1	01	002	2	01	08	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	60	ruang		3	0,50	17	11	11	19
1	01	002	2	01	11	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang di rehab	16	unit		1	0,08	8	2	2	13
1	01	002	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	paket		1	0,92	92	1	2	38
1	01	002	2	01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750	orang		150	0,00	0	150	150	20
1	01	002	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket		1	1,00	100	1	2	40
1	01	002	2	01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1356	satuan pendidikan		266	241,49	91	268	509	38
1	01	002	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	485	peserta didik		0	0,00	0	97	97	20
1	01	002	2	01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	565	orang		195	192,36	99	565	757	134

1	01	002	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	orang		40	10,71	27	60	71	24
1	01	002	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1260	satuan pendidikan		251	224,52	89	253	478	38
1	01	002	2	01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Dibangun	72	Unit		1	0,06	6	12	12	17
1	01	002	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola									
1	01	002	2	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	ruang		1	0,84	84	1	2	37
1	01	002	2	02	03	Pembangunan Ruangan Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru /Kepala Sekolah/ TU yang dibangun	2	ruang		1	0,03	3	1	1	51
1	01	002	2	02	04	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	2	ruang		1	0,03	3	1	1	51
1	01	002	2	02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibangun	2	ruang		0	0,00	0	0	0	-
1	01	002	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang dibangun	8	unit		0	0,00	0	3	3	38
1	01	002	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30	unit		3	1,68	56	5	7	22
1	01	002	2	02	14	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	42	ruang		3	0,71	24	8	9	21
1	01	002	2	02	17	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	5	unit		1	0,04	4	1	1	21
1	01	002	2	02	18	Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi	5	unit		1	0,03	3	1	1	21
1	01	002	2	02	24	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana ,Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	30	paket		1	0,07	7	5	5	17
1	01	002	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5	paket		1	0,92	92	1	2	38

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DISDIKPORA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**TAHUN
2026**

1	01	002	2	02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	1500	buku		0	0,00	0	300	300	-
1	01	002	2	02	34	Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500	paket		300	0,00	0	300	300	20
1	01	002	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket		1	0,99	99	1	2	40
1	01	002	2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	530	satuan pendidikan		104	99,20	95	105	204	39
1	01	002	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	185	peserta didik		0	0,00	0	37	37	20
1	01	002	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1325	orang		143	141,07	99	265	406	31
1	01	002	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	orang		40	3,58	9	60	64	21
1	01	002	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	385	satuan pendidikan		75	72,50	97	79	152	39
1	01	002	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Dikelola									
1	01	002	2	03	01	Pembangunan Gedung /Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	15	Unit		1	0	6	3	3	20
1	01	002	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekoh PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	25	Sekolah		1	0	5	5	5	20
1	01	002	2	03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9320	paket		1864	0	0	1864	1.864	20
1	01	002	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan	5	paket		1	1	100	1	2	40

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DISDIKPORA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**TAHUN
2026**

1	01	002	2	03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	600	satuan pendidikan		120	90	75	120	210	35
1	01	002	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	75	orang		15	14	94	15	29	39
1	01	002	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan (PAUD)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7300	orang		1460	1368	94	1400	2.768	38
1	01	002	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	2498	satuan pendidikan		460	461	100	460	921	37
1	01	002	2	04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal /Kesetaraan yang Dikelola									
1	01	002	2	04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	375	paket		75	0	0	75	75	20
1	01	002	2	04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang diadakan	5	paket		1	0	0	1	1	20
1	01	002	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	150	peserta didik		0	0	0	30	30	20
1	01	002	2	04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10	orang		2	2	99	2	4	40
1	01	002	2	04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5	satuan pendidikan		1	0	0	1	1	20
1	01	002	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	54	satuan pendidikan		9	9	102	9	18	34
1	01	002	2	04	19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang praktik yang dibangun	5	unit		1	0	3	1	1	21

1	01	004				PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)		guru/ murid							
1	01	004	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
1	01	004	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Jumlah Guru Bantu Provinsi	4372	dokumen		437	332	76	420	752	17
2	19	002				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda aktif Persentase wirausaha muda		% %							0
2	19	002	2	02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	002	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas	10	dokumen		4	4	95	2	6	58
2	19	003				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar berprestasi Persentase cabang olahraga daerah prestasi									

2	19	003	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	003	2	01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	unit		4	3	79	1	4	83
2	19	003	2	02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	003	2	02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1130	orang		284	65	23	139	204	18
2	19	003	2	04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									
2	19	003	2	05	01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	14	organisasi		2	2	100	3	5	36
2	19	004				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN	Persentase Gudep Aktif		%		-	-				0
2	19	004	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
2	19	004	2	01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5	organisasi		1	1	100	1	2	40
2	19	004	2	01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	150	orang		30	19	62	30	49	32

Pada tahun 2024 secara umum target capaian kinerja kegiatan dapat tercapai dengan baik, namun ada beberapa program dan kegiatan yang memiliki target capaian belum optimal disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran.

Langkah perencanaan dan penganggaran yang akan diambil pada tahun 2026 mendatang adalah :

1. Mengalokasikan porsi anggaran pada setiap program kegiatan sesuai dengan skala prioritas utama dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun 2025;
2. Merasionalkan target capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi dan sumber daya yang tersedia.
3. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada pada organisasi.

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dalam analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini diambil dari perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan antara Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi dengan Bupati Kuantan Singingi. Perjanjian kinerja tersebut dipandang dapat mewakili tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah karena memuat hampir semua pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan mempunyai kecenderungan yang tetap setiap tahun.

Disamping melihat indikator dalam Perjanjian Kinerja, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. IKU merupakan indikator pokok yang menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja Dalam menjalankan tugas fungsinya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Analisis pencapaian kinerja menurut IKU adalah sebagai berikut:

terdapat beberapa target terhadap capaian indikator sasaran, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke		Proyeksi Tahun Ke		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Angka Partisipasi Kasar TK/RA/TPA			55,35	60,25	50.67	51.94	46,89	47,54			Belum tercapai
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A			100	100	100	100	102,79	100,35			Tercapai
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B			95.21	99.21	100	100	89,06	91,14			Belum tercapai
4	Angka Partisipasi Murni TK/RA/TPA			54,85	60	100	100	41,32	44,94			Belum tercapai
5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket B			99.78	100	100	100	96,40	90,97			Belum tercapai
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B			94.41	98.41	100	100	60,87	71,17			Belum tercapai
7	Angka Kelulusan Siswa SD/MI			100	100	100	100	100	100			Tercapai
8	Angka Kelulusan SMP/MTs			100	100	100	100	100	100			Tercapai
9	Persentase guru memenuhi S1/DIV			92	95			89,05	86,28			Belum tercapai
10	Persentase Guru Telah Sertifikasi			60	65			32,55	33,48			Belum tercapai
11	Persentase Lembaga PNF yang Terstandarisasi			25	30			33,33	33,33			Tercapai
12	Persentase Sekolah Dasar Berakreditasi A			93	100	100		39,49	42,91			Belum tercapai
13	Persentase SMP Berakreditasi B			85	95	87.34		81,90	82,08			Belum tercapai
14	Persentase Lembaga PNF yang Terakreditasi			30	35			55,56	44/44			Tercapai
15	Angka Putus Sekolah SD/MI			0	0	0		0,0032	0,003			Tercapai
16	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			0.01	0	0		0,0112	0,015			Tercapai
17	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif			80	100	40	50	64	78			Belum tercapai
18	Persentase Wirausahaan Muda			50	60	40	50	41	44			Belum Tercapai
19	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif			50	60	50	60	43	66			Tercapai
20	Persentase Atlit Pelajar Berprestasi			80	85	50	55	0	54			Belum tercapai
CAPAIAN INDIKATOR SPM PENDIDIKAN												
1	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini	100%		100	100	100	100	47,47	47,47			Belum Tercapai
2	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Dasar	100%		100	100	100	100	96,40	96,40			Belum Tercapai
3	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%		100	100	100	100	55,53	55,53			Belum Tercapai
4	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesenitaraan	100%		100	100	100	100	0,79	0,79			Belum Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat dipaparkan bahwa sebagian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tercapai dengan baik, namun sebagian besar target kinerja yang lain belum tercapai dengan baik. Beberapa target capaian kinerja pada tahun 2024 yang belum tercapai sesuai dengan target kinerja, sebagai berikut :

1.

2. Persentase organisasi pemuda aktif
3. Persentase wirausaha muda
4. Persentase atlit pelajar berprestasi
5. Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
6. Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Dasar
7. Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
8. Persentase pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan

Sedangkan beberapa indikator kinerja yang telah tercapai sesuai dengan target Renstra pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. APK SD/MI/PAKET A
2. Angka Kelulusan Siswa SD/MI
3. Angka Kelulusan SMP/MTs
4. Persentase Lembaga PNF yang Terakreditasi
5. Angka Putus Sekolah SD/MI
6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
7. Persentase Lembaga PNF yang Terstandarisasi
8. Persentase Organisasi Pramuka yang aktif

Beberapa Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Renstra pada Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Keterbatasan anggaran karena adanya penyesuaian/rasionalisasi anggaran berdasarkan Keputusan Bersama menteri Dalam negeri dan Menteri Keuangan menyebabkan beberapa kegiatan untuk mendukung target capaian tidak dapat dianggarkan;
2. Terdapat target yang terlalu tinggi ditetapkan dalam Renstra sehingga tidak lagi relevan dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam upaya konsistensi pencapaian target kinerja RPJMD pada tahun mendatang yaitu :

1. Merevisi target dengan melakukan perubahan Renstra karena tidak lagi relevan dengan kondisi keuangan daerah
2. Mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara pendidikan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi

3. Membuat prioritas pembangunan dan memetakan kebutuhan mendesak.

Evaluasi terhadap kinerja tujuan dan sasaran daerah tahun 2022 dilakukan terhadap RENJA Tahun 2022 dan RENSTRA Tahun 2021-2026, evaluasi terhadap anggaran untuk program dan kegiatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Anggaran dan Realisasi Keuangan SKPD
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Target Kinerja Keuangan Tahun 2024	Realisasi per Desember Tahun 2024	(%)
1	Belanja Daerah	478.967.190.233,00	455.421.310.690,00	95.08%

Sumber : Laporan SPJ Fungsional Disdikpora Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi.

Realisasi Belanja pada Tahun 2024 berada pada posisi tinggi yaitu sebesar 95.08% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik seperti TKG, TPG dan Tamsil tidak terserap seluruhnya karena dana yang ditransfer pusat melebihi dari kebutuhan yang seharusnya sehingga sisa dana ini menjadi silpa. Dana yang bersumber dari bantuan keuangan propinsi Riau untuk guru bantu propinsi juga melebihi dari dana yang seharusnya sehingga dana ini juga bersisa menjadi silpa, dan terakhir hutang tunda bayar dari kegiatan tahun sebelumnya tidak bisa terealisasi disebabkan dokumen untuk pencairannya tidak selesai tepat waktu sehingga dana ini juga tidak dan untuk sub kegiatan yang telah terlaksana namun belum terealisasikan keuangannya disebabkan ketersediaan dana yang tidak tercukupi di Kas Daerah.

Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan IV
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Predikat Kinerja
1	Realisasi Kinerja (Fisik)	95,14%	Tinggi
2	Realisasi Keuangan (Anggaran)	95.08%	Tinggi

Sumber : Laporan SPJ Fungsional Disdikpora Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan capaian realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 berada pada predikat tinggi yaitu sebesar 95,14% dan Capaian realisasi Keuangan (anggaran) juga berada pada predikat tinggi juga yaitu dengan persentase 93,08% hal ini menyebabkan terjdinya tunda bayar karena secara fisik kegiatan telah terlaksana namun secara keuangan kegiatan tersebut belum terbaayarkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan data-data pencapaian realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1. Permasalahan untuk urusan pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian utama yakni :
 - 1) Belum Optimalnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan;
 - 2) Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan.
- 2. Sedangkan Permasalahan Kepemudaan dan olahraga adalah : belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi.

Identifikasi permasalahan pendidikan, kepemudaan dan olahraga beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

MASALAH POKOK (Tujuan dan Sasaran)		MASALAH (Strategi)		AKAR MASALAH (Arah Kebijakan)	
	Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan	1	Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan masih Rendah	1	Persentase guru jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D-IV masih rendah
				2	Persentase guru jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD bersertifikasi masih rendah
		2	Keterbatasan Penyediaan Fasilitas Pendidikan yang bermutu	1	Nilai rata-rata Ujian Nasional untuk jenjang Pendidikan Dasar masih rendah
				2	Prestasi siswa dalam mengikuti lomba minat bakat dan kreatifitas masih rendah

	Belum Optimalnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan		Keterjangkauan dalam mendapatkan layanan pendidikan masih sulit	1	Masih terdapat bangunan sekolah dalam kondisi tidak baik (rusak)
				2	Masih ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah hal ini bisa disebabkan faktor ekonomi terkait biaya pendidikan dan perlengkapan pendidikan
				3	Masih ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah, hal ini bisa disebabkan oleh jarak sekolah dengan Pemukiman yang relatif jauh
	Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi		Pembinaan terhadap pemuda terutama dalam bidang ekonomi masih belum maksimal	1	Persentase wirausaha muda masih rendah
			Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan belum maksimal	1	Masih rendahnya minat dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan
			Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	1	Jumlah sarana dan prasarana belum memadai
				2	Masih rendahnya prestasi olahraga daerah dan pengembangan olahraga unggulan daerah

Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan
2. Peningkatan dan pemerataan pengelolaan Pendidikan
3. Peningkatan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan
4. peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Masyarakat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lain sebagainya diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, untuk selanjutnya disaring berdasarkan skala prioritas dan urgensi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Atensi masyarakat terhadap pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga diwujudkan melalui dukungan, partisipasi, serta usulan berbagai program dan kegiatan baik yang disalurkan melalui forum resmi seperti Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan maupun melalui berbagai usulan yang disampaikan melalui media dan forum lainnya.

Dari Sekian Banyak usulan yang bisa dirangkum dari hasil musrenbang Tahun 2025 maupun forum lainnya pada umumnya terkait dengan pembangunan ruang kelas, pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah maupun rehab Ruang Kelas Sekolah baik TK, PAUD, SD dan SMP. Usulan tersebut ditindaklanjuti dengan mengajukan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui dana APBD Kabupaten maupun dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 sehingga dari usulan tersebut dapat kita lihat skala prioritas

bagi sekolah yang benar- benar membutuhkan. Secara khusus usulan untuk jenjang SMA/SMK dan jenjang pendidikan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi diarahkan dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Riau.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, program program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional. Adapun agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai penerjemahan Visi Misi dan Arahkan Presiden adalah sebagai berikut: 1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Tema pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 adalah “Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing didukung oleh Infrastuktur dan Manajemen Birokrasi yang Melayani” dengan prioritas pembangunan daerah :

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia
2. Meningkatkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing
3. Peningkatan Infrastruktur; dan
4. Manajemen Birokrasi yang melayani

Sedangkan prioritas yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah “Meningkatkan Pembangunan Manusia”.

Sungguhpun demikian, tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah yang perlu dijawab oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Suatu proritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walaupun tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*), dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan aspek daya saing daerah.
4. Korelasinya terhadap analisis isu strategis bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi.

Program prioritas kepala daerah untuk mendorong tercapainya misi meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Perangkat Daerah pengampu urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik yang tidak mampu
2. Pemerataan guru dan tenaga pendidik pada seluruh

kecamatan

3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui penguatan profesionalisme
4. Pembinaan olahraga berprestasi dan olahraga tradisional
5. Pemasyarakatkan olahraga dengan memperbanyak penyelenggaraan kompetisi olahraga
6. Pembinaan dan fasilitasi organisasi kepemudaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi. Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026 sebagai dasar perumusan program prioritas pembangunan daerah yang sudah disampaikan ketika berkampanye.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026”

Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. **BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
2. **RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;
3. **MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
4. **BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;
5. **SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah

mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. **HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dirumuskan penjelasan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 meliputi :

Misi 1 :

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan dan kebudayaan, melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi 2 :

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Misi 3 :

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup perempuan.

Misi 4 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah, infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Misi 5 :

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.

Tujuan dan sasaran merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya, dimana capaian indikator kinerja tujuan

merupakan capaian kinerja Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sedangkan capaian indikator sasaran merupakan capaian kinerja setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah memiliki indikator yang terukur, relevan dengan apa yang akan diperbaiki dan dapat diukur setiap tahunnya mulai tahun 2021-2026.

Tujuan yang ditetapkan tersebut harus konsisten dengan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan
3. Meningkatkan Pembinaan Olahraga

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi maka ditetapkan beberapa sasaran yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
dengan sasaran :

1. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Tujuan 2 : Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan
dengan sasaran :

1. Meningkatkan Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan

Tujuan 3 : Meningkatkan Pembinaan Olahraga
dengan sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Olahraga Prestasi dan Olahraga Pelajar

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran RPJMD 2021-2026 dan berdasarkan isu strategis. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi program pembangunan tahun 2023 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2023, masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan tahun 2025.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Prioritas Kabupaten yang merupakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan penjabaran Visi Misi.

Adapun program-program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 berpedoman pada daftar program menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-1317 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 serta kondisi keuangan daerah Kuantan Singingi tahun 2024, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pada tahun 2024 adalah diarahkan pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan nasional dan daerah.

Secara umum Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 terdiri dari **9 (sembilan) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dan 93 (sembilan puluh tiga) Sub Kegiatan.**

Dari 9 (sembilan) Program tersebut diatas dibagi menjadi 1 program urusan penunjang pemerintah daerah kabupaten/ kota. 5 program urusan pemerintah wajib berkaitan pelayanan dasar bidang pendidikan, 3 program urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga, dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah:

Terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pendidikan Sekolah Dasar
dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengadaan Mebel Sekolah
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4) Pelaksanaan Pengumpulan data statistik sektoral daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

dengan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Pendidikan :

Terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

dengan 18 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 4) Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 5) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 7) Pengadaan Mebel Sekolah
- 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 11) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 12) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
- 13) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 14) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 15) Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 16) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 17) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 18) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

dengan 16 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
- 3) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 6) Pengadaan Mebel Sekolah

- 7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - 9) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 10) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - 11) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 12) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - 13) Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - 14) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
 - 15) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 - 16) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
3. Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
dengan 10 sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - 2) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - 3) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - 4) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
 - 5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
 - 6) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - 7) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 - 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
 - 9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
 - 10) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
dengan 8 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 3) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 5) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 6) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 7) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- 8) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

III. Program Pengembangan Kurikulum :

Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- (1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

IV. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

V. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - 1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 3) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

VI. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota

VII. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :

Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

VIII. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

Terdiri dari 5 Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - 2) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahrag.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

IX. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan :

Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
 - 2) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

9 (sembilan) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dan 93 (sembilan puluh tiga) Sub Kegiatan diatas diharapkan dapat menyentuh secara langsung dengan akses pendidikan kepemudaan dan olahraga baik formal maupun non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana prasarana pendidikan, ketersediaan pelayanan data dan informasi berbasis teknologi informasi, pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga daerah serta ketersediaan sarana prasarana olahraga yang memadai. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta besaran anggarannya pada Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel T-C.33 dibawah ini :

Tabel T-C. 33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kuantan Singingi

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ /Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Rencana Akhir Tahun 2026						Perkiraan maju	
						Capaian Program	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Kebut Dana / Indika
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
'DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										348.081.397.339			374.473	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						333.662.897.339			370.36
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						333.662.897.339			370.36
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20%			286.429.469.439		20%	287.61
1	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat					8 dokumen	25.000.000		8 dokumen	38

					Daerah									
1	01	001	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		5 dok		10.000.000	APBD	5 dok	13
1	01	001	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		2 dok		5.000.000	APBD	2 dok	10
1	01	001	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		1 dok		5.000.000	APBD	1 dok	10
1	01	001	2,01	09	Pelaksanaan Pengumpulan data statistik sektoral daerah		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		1 dok		5.000.000	APBD	1 dok	5
1	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	282.817.344.989		100%	285.39
1	01	001	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Kuantan Singingi		4151 orang/bulan		282.812.344.989	APBD	2931 orang/bulan	285.39

1	01	001	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		1 dok		5.000.000	APBD	1 dok	5
1	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					44,00%	16.500.000		44,00%	100
1	01	001	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Luar Kabupaten Kuantan Singingi		19 orang		16.500.000	APBD	20 orang	100
1	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100,00%	779.096.575		100,00%	1.020
1	01	001	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Kuantan Singingi		3 paket		25.000.000	APBD	3 paket	150
1	01	001	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Kuantan Singingi		13 paket		389.360.000	APBD	13 paket	500
1	01	001	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Kuantan Singingi		3 paket		17.456.250	APBD	3 paket	20
1	01	001	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Kuantan Singingi		1 dokumen		26.559.125	APBD	1 dokumen	50
1	01	001	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Luar dan Dalam Kabupaten Kuantan Singingi		389 laporan		320.721.200	APBD	389 laporan	300

1	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	1.448.000.000		100%	50
1	01	001	2,07	05	Pengadaan Mebel Sekolah		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		3 unit		800.000.000			
1	01	001	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		8 unit		648.000.000	APBD	8 unit	50
1	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	218.286.000		100%	505
1	01	001	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Kuantan Singingi		13750 laporan		45.000.000	APBD	13750 laporan	50
1	01	001	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Kuantan Singingi		39 laporan		173.286.000	APBD	39 laporan	455
1	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	1.125.241.875		100%	505
1	01	001	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		3 unit		25.000.000	APBD	3 unit	90

1	01	001	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Sungaijering		5 unit		125.000.000			125
1	01	001	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Kuantan Singingi		1 Unit		975.241.875	APBD	113 Unit	290
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD		51,94%			46.267.282.800		53,20%	82.200
						APK SD/MI/PAKET A		100,00%					100,00%	
						APK SMP/MTs/PAKET B		100,00%					100,00%	
						Persentase SD dengan Akreditasi Minimal B		85,10%					85,25%	
						Persentase SMP dengan Akreditasi Minimal B		87,56%					87,88%	
						Persentase bangunan SD/MI dalam kondisi baik		87,46%					87,64%	

					Persentase bangunan SMP/MTs dalam kondisi baik		71,34%					72,82%	
					Angka Kelulusan SD/MI		100,00%					100,00%	
					Angka Kelulusan SMP/MTs		100,00%					100,00%	
					Jumlah siswa pendidikan sekolah dasar yang mendapat bantuan peralatan pendidikan		340					360	
					Angka Melek Huruf		98,38%					98,41%	
					Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)		885,95					888,61	
1	01	002	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					20%	28.646.878.900		20% 77.057
1	01	002	2,01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Kab. Kuantan Singingi					APBD	1 unit 1.120

1	01	002	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Kab. Kuantan Singingi		8 ruang		4.297.582.200	APBD	9 ruang	3.882
1	01	002	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		4 ruang		769.310.200	APBD	14 ruang	2.160
1	01	002	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		2 ruang		1.094.128.200	APBD	5 ruang	2.161
1	01	002	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		6 unit		1.517.915.200	APBD	35 unit	7.332
1	01	002	2,01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		1 Unit		293.323.500			
1	01	002	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Kab. Kuantan Singingi					APBD	2 ruang	590
1	01	002	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		1 unit		504.130.500			
1	01	002	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		1 paket		648.948.000	APBD	1 paket	4.000
1	01	002	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Kab. Kuantan Singingi					APBD	7 paket	7.500

1	01	002	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Luar dan Dalam Kabupaten Kuantan Singingi		27 peserta didik		140.922.000	APBD	97 peserta didik	146
1	01	002	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Kab. Kuantan Singingi					APBD	624 orang	9.500
1	01	002	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Kab. Kuantan Singingi		300 orang		255.250.000	APBD	60 orang	700
1	01	002	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		259 satuan pendiidkan		100.000.000			
1	01	002	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Kab. Kuantan Singingi		252 satuan pendidikan			APBD	252 satuan pendidikan	
1	01	002	2,01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Kab. Kuantan Singingi		2 ruang			APBD	2 ruang	870
1	01	002	2,01	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		260 Orang		82.320.000			
1	01	002	2,01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		100 Orang		100.000.000			
1	01	002	2,01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		2 Dokumen		110.000.000			110

				41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kab. Kuantan Singingi		40 Komunitas		150.000.000			110
1	01	002	2,01	46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		150 unit			APBD	150 unit	160
1	01	002	2,01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Kab. Kuantan Singingi		17 ruang		7.261.138.400	APBD	36 ruang	15.501
1	01	002	2,01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		238 satuan pendidikan		204.855.000	APBD	240 satuan pendidikan	304
1	01	002	2,01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		47 ruang		10.189.777.700	APBD	72 ruang	20.906
1	01	002	2,01	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						927.278.000			
1	01	002	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					20%	7.184.267.400		20%	2.164
1	01	002	2,02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Kab. Kuantan Singingi		2 ruang		1.204.906.000	APBD	2 ruang	1.009
1	01	002	2,02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Kab. Kuantan Singingi		1 ruang		356.596.400	APBD		
1	01	002	2,02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		1 Unit		293.323.500	APBD		
1	01	002	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		0 0		889.550.000	APBD		

1	01	002	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		1 ruang		636.612.000	APBD		
1	01	002	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		1 paket		599.949.000	APBD		
1	01	002	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Kab. Kuantan Singingi		631 Peserta Didik		189.300.000	APBD		120
1	01	002	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Kab. Kuantan Singingi		34 Peserta Didik		147.301.700	APBD		186
1	01	002	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Kuantan Singingi		240 Orang		184.896.000	APBD		159
1	01	002	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Kab. Kuantan Singingi		80 Satuan Pendidikan		129.635.600	APBD		
1	01	002	2,02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		80 Orang		129.635.600	APBD		160
1	01	002	2,02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Kab. Kuantan Singingi		5 Komunitas		143.630.000	APBD		165
1	01	002	2,02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		80 Satuan Pendidikan		143.708.000	APBD		214
1	01	002	2,02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Kab. Kuantan Singingi		1 Ruang		1.197.212.000	APBD		

1	01	002	2,02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Luar dan Dalam Kabupaten Kuantan Singingi		240 Orang		110.000.000	APBD		150
1	01	002	2,02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		1 paket		828.011.600	APBD		
1	01	002	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					20%	10.133.720.500	APBD	20%	2.513
1	01	002	2,03	02	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Kab. Kuantan Singingi		1417 Orang		7.206.630.000	APBD		797
1	01	002	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Kab. Kuantan Singingi		100 Satuan Pendidikan		1.461.587.500	APBD		100
1	01	002	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Kab. Kuantan Singingi		45 orang		54.000.000	APBD		60
1	01	002	2,03	23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		2 Konten Digital		50.000.000	APBD		50
1	01	002	2,03	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		60 orang		45.276.000	APBD		112
1	01	002	2,03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		60 Dokumen		73.384.000	APBD		94

1	01	002	2,03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		20 Dokumen		50.000.000	APBD		50
1	01	002	2,03	34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		45 Peserta didik		144.024.000	APBD		150
1	01	002	2,03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		40 Orang		91.896.000	APBD		98
1	01	002	2,03	40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Kab. Kuantan Singingi		1 unit		956.923.000	APBD		1.000
1	01	002	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					40%	302.416.000	APBD	40%	464
1	01	002	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Kab. Kuantan Singingi		10 Peserta Didik		30.000.000	APBD		50
1	01	002	2,04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Kuantan Singingi		0			APBD		60
1	01	002	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Kuantan Singingi		20 Orang		26.990.000	APBD		30
1	01	002	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Kab. Kuantan Singingi		1 Satuan Pendidikan		49.908.000	APBD		58
1	01	002	2,04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		6 Dokumen		19.550.000	APBD		58

1	01	002	2,04	36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		75 Paket		49.550.000	APBD		54
1	01	002	2,04	42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Kab. Kuantan Singingi		25 Orang		62.734.000	APBD		81
1	01	002	2,04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Kab. Kuantan Singingi		40 Peserta Didik		63.684.000	APBD		70
1	01	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Budaya Daerah dan Ciri Khas Daerah		21%			200.000.000	APBD	24%	550
1	01	003	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					21%	200.000.000	APBD	24%	550
1	01	003	2,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kab. Kuantan Singingi		125 orang		200.000.000	APBD		550
1	01	004			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)				885,95	300.000.000		888,61	
					[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik]									

1	01	004	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					20%	300.000.000		20%	
1	01	004	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Dokumen		100.000.000			
1	01	004	2,01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Kab. Kuantan Singingi		12 Laporan		200.000.000			
1	01	005			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						321.322.000			
1	01	05	2,01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						72.800.000			
1	01	05	2,01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				12 Dokumen		35.000.000			
1	01	05	2,01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3 Dokumen		37.800.000			
1	01	05	2,02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						248.522.000			192

1	01	05	2,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen		100.000.000			
1	01	05	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				75 Dokumen		73.522.000			82
1	01	05	2,02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokumen		73.522.000			110
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						144.823.100			
1	01	06	2,01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						144.823.100			127
1	01	06	2,01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen		65.947.100			50
1	01	06	2,01	10	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota				2 0		78.876.000			77
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2	19	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						14.418.500.000			4.110

2	19	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda aktif		50,00%			407.770.000		60,00%	290
						Persentase wirausaha muda		50,00%					70,00%	
2	19	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					20%	257.770.000		20%	125
2	19	02	2,01	10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				1 dokumen		24.460.000			30
2	19	02	2,01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				100 orang		113.270.000			137
2	19	002	2,01	14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		Kab. Kuantan Singingi		100 orang		120.040.000	ABPD		125
2	19	002	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20%	150.000.000		20%	165

2	19	002	2,02	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		Kab. Kuantan Singingi		1 unit		150.000.000	ABPD		165
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabang olahraga daerah prestasi		60,00%			13.446.190.000		70,00%	3.072
						Persentase atlit pelajar berprestasi		55,00%					65,00%	
2	19	003	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5303541800	20%	1.646.240.000		20%	165
2	19	003	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Kab. Kuantan Singingi		1 unit		1.646.240.000	DAK Fisik		165
2	19	003	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20%	1.443.280.000		20%	1.490
2	19	003	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tinglat Kabupaten/Kota		Dalam dan Luar Kab. Kuantan Singingi		1 Kegiatan		188.560.000	APBD		220
2	19	003	2,02	03	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Dalam dan Luar Kab. Kuantan Singingi		300 orang		1.254.720.000	APBD		1.270

2	19	003	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					0%	260.470.000		20%	297
2	19	003	2,03	03	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Dalam dan Luar Kab. Kuantan Singingi		1 Pelatda		260.470.000	APBD		297
2	19	003	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					10%	9.900.000.000		10%	900
2	19	003	204	02	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		Kab. Kuantan Singingi		4 Dokumen		9.900.000.000	APBD		900
2	19	003	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					0%	196.200.000		10%	220
2	19	003	205	01	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		Kab. Kuantan Singingi		1 Lembaga		196.200.000	APBD		220
2	19	004			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudep aktif		70%			564.540.000		75%	748
2	19	004	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					10%	564.540.000		10%	748
2	19	004	201	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Kab. Kuantan Singingi		1 organisasi		400.000.000	APBD		550

2	19	004	201	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Kab. Kuantan Singingi		30 orang		164.540.000	APBD		198
---	----	-----	-----	----	--	--	-----------------------------	--	----------	--	-------------	------	--	-----

Teluk Kuantan, Oktober 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

H. HERIZON,S.Pd.SD, MM
Pembina TK I/ IVb
NIP. 19731204 199803 1 007

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 telah Menempatkan Pendidikan pada agenda khusus dan prioritas dalam rangka memenuhi misi pembangunan daerah. Hal ini selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun agenda dan prioritas utama tahun 2025 adalah peningkatan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kepemudaan dan olahraga, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik yang memadai dan peningkatan prestasi dibidang olahraga baik di tingkat daerah, regional maupun nasional serta internasional.

Berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 serta kondisi keuangan daerah Kuantan Singingi tahun 2026, maka Program Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pada tahun 2026 adalah diarahkan pada pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan nasional dan daerah.

Secara umum Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA

Kode					Urusan/ /Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)
						Progra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an	
'DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									348.081.397.339
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				333.662.897.339
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				333.662.897.339
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20%			286.429.469.439
1	0	0	2,		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 dokume n	25.000.000
	1	0	0						
		1	1						
1	0	0	2,	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok		10.000.000
	1	0	0	1					
1	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 dok		5.000.000
	1	0	0	6					
1	0	0	2,	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dok		5.000.000
	1	0	0	7					
1	0	0	2,	0	Pelaksanaan Pengumpulan data statistik sektoral daerah		1 dok		5.000.000
	1	0	0	9					
		1	1						
1	0	0	2,		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	282.817.344.989
	1	0	0						
		1	2						
1	0	0	2,	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4151 orang/bu lan		282.812.344.989
	1	0	0	1					
		1	2						
1	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dok		5.000.000
	1	0	0	5					
		1	2						
1	0	0	2,		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44,00%	16.500.000
	1	0	0						
		1	5						
1	0	0	2,	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		19 orang		16.500.000
	1	0	0	9					
		1	5						
1	0	0	2,		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00%	779.096.575
	1	0	0						
		1	6						
1	0	0	2,	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3 paket		25.000.000
	1	0	0	1					
		1	6						

1	0	0	2,	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		13 paket		389.360.000
1	1	0	0	4					
1	1	0	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3 paket		17.456.250
1	1	0	0	6					
1	1	0	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 dokume n		26.559.125
1	1	0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		389 laporan		320.721.200
1	1	0	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1.448.000.000
1	1	0	0	5	Pengadaan Mebel Sekolah		3 unit		800.000.000
1	1	0	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8 unit		648.000.000
1	1	0	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	218.286.000
1	1	0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13750 laporan		45.000.000
1	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		39 laporan		173.286.000
1	1	0	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.125.241.875
1	1	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3 unit		25.000.000
1	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 unit		125.000.000
1	1	0	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit		975.241.875
1	1	0	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	51,94%			46.267.282.800
						100,00 %			
						100,00 %			
						85,10%			
						87,56%			
						87,46%			
						71,34%			
						100,00 %			

						100,00 %			
						340			
						98,38%			
						885,95			
1	0	0	2,		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			20%	28.646.878.900
1	1	0	0	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				
1	1	0	2,	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		8 ruang		4.297.582.200
1	1	0	0	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		4 ruang		769.310.200
1	1	0	2,	0	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		2 ruang		1.094.128.200
1	1	0	0	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		6 unit		1.517.915.200
1	1	0	2,	0	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		1 Unit		293.323.500
1	1	0	0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				
1	1	0	2,	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		1 unit		504.130.500
1	1	0	0	4	Pengadaan Mebel Sekolah		1 paket		648.948.000
1	1	0	2,	2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				
1	1	0	0	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		27 peserta didik		140.922.000
1	1	0	2,	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
1	1	0	0	7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		300 orang		255.250.000
1	1	0	2,	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		259 satuan pendidikan		100.000.000
1	1	0	2,	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		252 satuan pendidikan		
1	1	0	0	3	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		2 ruang		

1	0	0	2,	3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	260 Orang		82.320.000
1	0	0	2,	3	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100 Orang		100.000.000
1	0	0	2,	3	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2 Dokumen		110.000.000
				4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	40 Komunitas		150.000.000
1	0	0	2,	4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150 unit		
1	0	0	2,	4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17 ruang		7.261.138.400
1	0	0	2,	5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	238 satuan pendidikan		204.855.000
1	0	0	2,	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	47 ruang		10.189.777.700
1	0	0	2,	5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			927.278.000
1	0	0	2,		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		20%	7.184.267.400
1	0	0	2,	0	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 ruang		1.204.906.000
1	0	0	2,	0	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 ruang		356.596.400
1	0	0	2,	0	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit		293.323.500
1	0	0	2,	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0 0		889.550.000
1	0	0	2,	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1 ruang		636.612.000
1	0	0	2,	2	Pengadaan Mebel Sekolah	1 paket		599.949.000
1	0	0	2,	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	631 Peserta Didik		189.300.000
1	0	0	2,	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34 Peserta Didik		147.301.700
1	0	0	2,	4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	240 Orang		184.896.000

1	0	0	2,	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	80 Satuan Pendidikan		129.635.600
1	0	0	2,	4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang		129.635.600
1	0	0	2,	5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5 Komunitas		143.630.000
1	0	0	2,	5	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	80 Satuan Pendidikan		143.708.000
1	0	0	2,	5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Ruang		1.197.212.000
1	0	0	2,	6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	240 Orang		110.000.000
1	0	0	2,	6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1 paket		828.011.600
1	0	0	2,		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		20%	10.133.720.500
1	0	0	2,	0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1417 Orang		7.206.630.000
1	0	0	2,	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100 Satuan Pendidikan		1.461.587.500
1	0	0	2,	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	45 orang		54.000.000
1	0	0	2,	2	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	2 Konten Digital		50.000.000
1	0	0	2,	2	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	60 orang		45.276.000
1	0	0	2,	2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen		73.384.000
1	0	0	2,	2	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20 Dokumen		50.000.000
1	0	0	2,	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	45 Peserta didik		144.024.000
1	0	0	2,	3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	40 Orang		91.896.000
1	0	0	2,	4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit		956.923.000
1	0	0	2,		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		40%	302.416.000

		2	4						
1	0	0	2,	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		10 Peserta Didik		30.000.000
1	1	0	0	0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0		
1	1	0	2,	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		20 Orang		26.990.000
1	1	0	2,	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1 Satuan Pendidikan		49.908.000
1	1	0	2,	2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		6 Dokumen		19.550.000
1	1	0	2,	3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		75 Paket		49.550.000
1	1	0	2,	4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		25 Orang		62.734.000
1	1	0	2,	4	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		40 Peserta Didik		63.684.000
1	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	21%			200.000.000
1	1	0	2,		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			21%	200.000.000
1	1	0	2,	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		125 orang		200.000.000
1	1	0			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			885,95	300.000.000
					[Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik]				
1	1	0	2,		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			20%	300.000.000
1	1	0	2,	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		12 Dokumen		100.000.000
1	1	0	2,	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		12 Laporan		200.000.000
1	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				321.322.000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DISDIKPORA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI									
TAHUN 2026									
1	0	0	2,		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				72.800.000
1	1	5	0	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		12 Dokume n		35.000.000
1	1	5	0	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		3 Dokume n		37.800.000
1	1	5	0	2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				248.522.000
1	1	5	0	2	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Dokume n		100.000.000
1	1	5	0	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		75 Dokume n		73.522.000
1	1	5	0	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 Dokume n		73.522.000
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				144.823.100
1	1	6	0	1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				144.823.100
1	1	6	0	7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokume n		65.947.100
1	1	6	0	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota		2 0		78.876.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				14.418.500.000
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	50,00%			407.770.000
						50,00%			
2	1	0	2,	0	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			20%	257.770.000

2	1	0	2,	1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		1 dokume n		24.460.000
2	1	0	2,	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		100 orang		113.270.000
2	1	0	2,	1	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		100 orang		120.040.000
2	1	0	2,		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20%	150.000.000
2	1	0	2,	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		1 unit		150.000.000
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	60,00%			13.446.190.000
						55,00%			
2	1	0	2,		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		5303541 800	20%	1.646.240.000
2	1	0	2,	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		1 unit		1.646.240.000
2	1	0	2,		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20%	1.443.280.000
2	1	0	2,	0	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tinglat Kabupaten/Kota		1 Kegiatan		188.560.000
2	1	0	2,	0	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		300 orang		1.254.720.000
2	1	0	2,		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			0%	260.470.000

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DISDIKPORA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI										TAHUN 2026	
2	1	0	2	0	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		1	Pelatda			260.470.000
2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				10%		9.900.000.000
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		4	Dokume n			9.900.000.000
2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				0%		196.200.000
2	1	0	2	0	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		1	Lembag a			196.200.000
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	70%					564.540.000
2	1	0	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				10%		564.540.000
2	1	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		1	organisa si			400.000.000
2	1	0	2	0	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		30	orang			164.540.000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

H. HERIZON, S.Pd.SD, MM

Pembina TK I/IVb
 NIP. 197312041998031007

BAB V

PENUTUP

Proses penyusunan RKPD dan RENJA Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, RKPD Propinsi Riau Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. Keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut sangat erat, kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyusunan awal rancangan Renja Perangkat Daerah Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Kuantan Singingi berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Pemerintrah dan DPRD. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RENJA adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD

Dokumen Renja dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang

dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan daerah yaitu perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka Rencana Kerja agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing Perangkat Daerah dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan Perangkat Daerah pada posisi strategis, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing bidang.
2. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program yang ada di Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 dengan sebaik baiknya;
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Bidang wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap Bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RENSTRA dan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku pembangunan lainnya.

1. RKPD dan Rencana Kerja merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran pembangunan yang dimuat dalam RKPD dan RENJA Tahun 2026, sehingga program kegiatan di masing masing Perangkat Daerah mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
2. Rancanagn Akhir Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Propinsi Riau maupun dengan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara *sharing* pembiayaan pembangunan dengan APBD Provinsi, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing*

- yang dimuat dalam RKPD dan RENJA masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
3. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Teluk Kuantan, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

H. HERIZON, S.Pd.SD, MM
Pembina TK I/IVb
NIP. 197312041998031007